

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan pemerintah daerah, baik ditingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya yang dapat diandalkan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kebijakan ini disambut baik, mengingat lepasnya campur tangan pemerintah akan memberikan kesempatan yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Saragih dalam Anggiat, 2009: 2). Daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi pemerintah pusat, tetapi benar-benar mempunyai keleluasaan untuk meningkatkan kreatifitas dalam mengembangkan potensi yang selama era sentralisasi bisa dikatakan terpasung.

Konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab telah membentuk sistem baru bagi pemerintahan di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti dan mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya. Otonomi daerah membuka peluang, tantangan dan kendala terutama kepada daerah kabupaten dan kota untuk

lebih leluasa mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat. Salah satu peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi daerah adalah masalah kesiapan sumber-sumber pembiayaan atau kemampuan daerah menyelenggarakan urusan rumah tangga secara mandiri.

Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah mengakibatkan ketidakstabilan kesiapan pemerintah Kabupaten/Kota utamanya dalam hal keuangannya karena kinerja keuangan menjadi tolak ukur kesiapan pemerintah Kabupaten/Kota (Bambang Haryadi dalam Bernanda Gatot, 2008: 2). Hal ini memang menjadi konsekuensi logis daerah otonomi daerah yakni pemerintah daerah harus lebih mandiri dari segala hal termasuk dari segi keuangan.

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya anggaran belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah.

Belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama

ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Tabel 1.1
Tabel Realisasi Belanja Modal
Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Tahun 2007 - 2009
(dalam Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Belanja Modal (Dalam Juta Rupiah)		
		2007	2008	2009
1	Kab. Bandung	370,894	180,480	178,237
2	Kab. Bekasi	416,359	148,106	714,611
3	Kab. Bogor	340,918	366,016	560,606
4	Kab. Ciamis	308,616	312,876	163,994
5	Kab. Cianjur	202,577	222,114	254,617
6	Kab. Cirebon	158,255	140,036	134,776
7	Kab. Garut	218,555	249,645	140,303
8	Kab. Indramayu	217,127	216,436	212,444
9	Kab. Karawang	194,035	171,100	209,902
10	Kab. Kuningan	111,644	74,213	21,009
11	Kab. Majalengka	201,555	149,482	102,299
12	Kab. Purwakarta	78,310	72,290	132,612
13	Kab. Subang	193,917	199,216	165,794
14	Kab. Sukabumi	188,218	149,046	114,953
15	Kab. Sumedang	99,994	104,144	76,343
16	Kab. Tasikmalaya	227,325	211,679	247,503
17	Kota Bandung	232,008	344,715	528,673
18	Kota Bekasi	308,046	304,885	282,381
19	Kota Bogor	113,016	91,191	137,369
20	Kota Cirebon	90,168	94,379	86,044
21	Kota Depok	170,023	233,911	206,481
22	Kota Sukabumi	68,837	82,066	125,557
23	Kota Tasikmalaya	105,770	109,899	93,757
24	Kota Cimahi	100,878	101,204	99,886
25	Kota Banjar	152,937	100,904	116,191
26	Kab. Bandung Barat	-	77,879	125,409

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2006 - 2008 (diolah)

Dari tabel di atas dapat terlihat pertumbuhan belanja modal yang terjadi di kabupaten/kota di Jawa Barat. Pada tahun 2009 memang terlihat terjadi

peningkatan pada beberapa kabupaten/kota namun tidak sedikit pula kabupaten/kota yang mengalami penurunan belanja modal. Adapun daerah yang mengalami peningkatan belanja modal yakni Kab. Bekasi, Kab. Bogor, Kab. Cianjur, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Tasikmalaya, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Banjar dan Kab. Bandung Barat. Sedangkan daerah yang mengalami penurunan belanja modal, yakni Kab. Bandung, Kab. Ciamis, Kab. Cirebon, Kab. Garut, Kab. Indramayu, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Subang, Kab. Sukabumi, Kab. Sumedang, Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya dan Kota Cimahi. Masih adanya daerah yang mengalami penurunan belanja modal menunjukkan adanya penurunan belanja yang sifatnya produktif pada daerah yang bersangkutan.

Dari perbandingan persentase belanja modal terhadap total belanja daerah pada tahun 2009, belanja modal mencapai angka 11,18% dari total belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat, sedangkan sisanya yaitu sebesar 88,82% adalah belanja diluar belanja modal. Hal ini menunjukkan pengeluaran untuk belanja yang bersifat produktif yaitu belanja modal masih terbilang kecil apabila dibandingkan dengan pengeluaran terhadap belanja lain selain belanja modal, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bagi hasil dan atau belanja bantuan keuangan.

Kebijakan yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU ini merupakan penyempurnaan UU No 22 tahun 1999 dan UU No 25 tahun 1999).

Diberlakukannya undang-undang ini memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk di kembangkan menjadi sumber PAD. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah.

Untuk itulah maka pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi baru dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai suatu wujud nyata otonomi. Pengembangan dan penggalian potensi PAD sebenarnya sudah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak, mengingat PAD sangat mendukung terwujudnya pelaksanaan otonomi yang utuh, nyata dan bertanggungjawab di daerah kabupaten atau kota. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan PAD akan membawa kearah kemajuan perekonomian daerah yang akan berdampak pada peningkatan pembangunan di daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Mardiasmo, 2002: 132). Pajak daerah dan retribusi daerah selama ini merupakan

sumber pendapatan daerah yang dominan, oleh karena itu perlu ditingkatkan penerimaannya. Berdasarkan alur pikir teori keuangan daerah, penerimaan pajak pada umumnya digunakan untuk membiayai jasa layanan yang bersifat murni publik (*public goods*), sedangkan penerimaan retribusi umumnya digunakan untuk membiayai jasa pelayanan yang bersifat semi publik (*semi public goods*) di mana komponen manfaat individunya relatif lebih besar.

Menurut Mardiasmo (dalam Anggiat 2009: 3) mengatakan bahwa 'saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah'. Keterbatasan infra struktur seperti sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya alokasi PAD terhadap anggaran belanja modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat?

Studi Abdullah (dalam Anggiat 2009: 4) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian spread PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk belanja modal justru mengalami penurunan. Abdullah (dalam Anggiat 2009: 4) menduga power legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan spread PAD tidak sesuai dengan preferensi publik.

Abdullah & Halim (2004: 10) menemukan bahwa "sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan". Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 10% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap

pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis. (Abdullah & Halim, 2004: 10).

Tabel 1.2
Tabel Realisasi PAD
Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Tahun 2007 - 2009
(dalam Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah (Dalam Juta Rupiah)		
		2007	2008	2009
1	Kab. Bandung	147,631	144,660	151,496
2	Kab. Bekasi	196,320	249,064	200,653
3	Kab. Bogor	265,371	307,634	309,226
4	Kab. Ciamis	54,712	44,847	46,561
5	Kab. Cianjur	69,278	77,905	87,867
6	Kab. Cirebon	100,693	101,513	116,133
7	Kab. Garut	76,880	83,306	91,429
8	Kab. Indramayu	47,705	56,771	68,615
9	Kab. Karawang	121,415	131,785	115,412
10	Kab. Kuningan	43,508	42,825	52,748
11	Kab. Majalengka	46,021	47,722	53,530
12	Kab. Purwakarta	50,324	59,429	67,084
13	Kab. Subang	55,690	64,034	68,801
14	Kab. Sukabumi	66,799	87,402	87,562
15	Kab. Sumedang	69,493	88,256	90,533
16	Kab. Tasikmalaya	34,725	47,194	37,671
17	Kota Bandung	287,249	314,627	374,712
18	Kota Bekasi	171,045	189,493	229,532
19	Kota Bogor	79,819	97,768	89,223
20	Kota Cirebon	58,605	63,454	70,926
21	Kota Depok	86,347	112,772	88,872
22	Kota Sukabumi	49,464	65,263	57,237
23	Kota Tasikmalaya	58.605	63,849	60,880
24	Kota Cimahi	55,851	64,965	74,163
25	Kota Banjar	23,616	23,782	24,400
26	Kab. Bandung Barat	-	33,617	35,508

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2006 - 2008 (diolah)

Dari tabel 1.2, terlihat peningkatan PAD yang terjadi pada kabupaten/kota di Jawa Barat pada tahun 2009. 19 daerah kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami peningkatan PAD, penurunan PAD hanya terjadi di tujuh daerah saja, yaitu Kab. Bekasi mengalami penurunan sebesar Rp. 48.411.000.000,00, Kab.

Karawang sebesar Rp. 16.373.000.000,00, Kab. Tasikmalaya Rp. 9.523.000.000,00, Kota Bogor Rp. 8.545.000.000,00, Kota Depok Rp. 23.900.000.000,00, Kota Sukabumi Rp. 8.026.000.000,00 dan Kota Tasikmalaya mengalami penurunan sebesar Rp. 2.969.000.000,00. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan positif PAD pada tahun 2008 pada kabupaten/kota di Jawa Barat.

Namun menurut Setiaji (dalam Anggiat, 2009: 4) mengatakan bahwa 'perbedaan pertumbuhan PAD tidak diikuti dengan kenaikan kontribusi PAD terhadap anggaran belanja modal dan peningkatan PAD tidak sebanding dengan peningkatan total belanja Pemerintah Daerah'. Dengan itu pertumbuhan PAD yang terjadi tidak dapat dijadikan tolak ukur peningkatan kontribusinya (PAD) terhadap belanja daerah dan belanja modal pada khususnya.

Untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar, pemerintah memberikan dana perimbangan dan salah satu komponen dana ini yang memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Anggiat, 2009: 16).

Konsekuensi akibat penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengakibatkan perlunya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan terjadinya transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana tersebut untuk

memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang mungkin tidak penting.

Tabel 1.3
Tabel Realisasi DAU
Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Tahun 2007 - 2009
(dalam Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (Dalam Juta Rupiah)		
		2007	2008	2009
1	Kab. Bandung	1,351,912	1,001,542	1,080,216
2	Kab. Bekasi	430,417	525,366	618,238
3	Kab. Bogor	962,196	1,062,589	1,112,000
4	Kab. Ciamis	775,730	857,303	858,188
5	Kab. Cianjur	757,052	824,504	840,790
6	Kab. Cirebon	730,886	793,934	828,679
7	Kab. Garut	911,801	1,002,248	1,012,059
8	Kab. Indramayu	610,891	682,130	706,786
9	Kab. Karawang	622,602	689,522	722,111
10	Kab. Kuningan	550,002	586,884	638,788
11	Kab. Majalengka	555,540	642,722	642,722
12	Kab. Purwakarta	370,015	454,475	454,475
13	Kab. Subang	560,645	618,600	666,936
14	Kab. Sukabumi	759,683	827,153	855,802
15	Kab. Sumedang	551,711	608,993	629,007
16	Kab. Tasikmalaya	718,561	789,565	801,713
17	Kota Bandung	828,295	965,519	989,246
18	Kota Bekasi	522,199	590,144	630,404
19	Kota Bogor	359,576	397,367	439,254
20	Kota Cirebon	304,470	340,669	358,971
21	Kota Depok	381,095	427,136	456,937
22	Kota Sukabumi	285,095	278,944	287,531
23	Kota Tasikmalaya	373,869	410,131	418,874
24	Kota Cimahi	270,848	305,009	339,007
25	Kota Banjar	274,356	191,153	209,611
26	Kab. Bandung Barat	-	486,211	566,578

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2006 - 2008 (diolah)

Pada tabel 1.3, terlihat pertumbuhan DAU tahun 2009. Secara keseluruhan kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami peningkatan DAU, dan tidak ada daerah yang mengalami penurunan. Hanya pada daerah Kab. Majalengka dan Kab. Purwakarta yang tidak mengalami peningkatan DAU, realisasi DAU tahun 2009 pada dua daerah tersebut sama besar dengan tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi DAU yang terjadi pada hampir semua daerah menunjukkan masih adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, khususnya DAU.

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain termasuk PAD (Adi dalam Cristy dan Adi, 2009), ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pasokan dana dari pemerintah pusat saat ini. Namun demikian, dalam jangka panjang, ketergantungan semacam ini harus menjadi semakin kecil.

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et.al., (dalam Darwanto, 2007: 12) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara dana perimbangan dengan belanja pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non-linier dan *asymmetric*.

Tabel 1.4
Tabel Komposisi DAU pada Pos Dana Perimbangan
Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Tahun 2009
(dalam Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Dana Perimbangan (Tahun 2009)		
		Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus
1	Kab. Bandung	109,358	1.080,216	29,388
2	Kab. Bekasi	387,073	618,238	28,437
3	Kab. Bogor	209,858	1,112,000	61,470
4	Kab. Ciamis	57,245	858,188	104,122
5	Kab. Cianjur	102,689	840,790	101,257
6	Kab. Cirebon	66,550	828,679	49,054
7	Kab. Garut	74,552	1,012,059	102,035
8	Kab. Indramayu	179,956	706,786	45,506
9	Kab. Karawang	182,281	722,111	52,623
10	Kab. Kuningan	48,479	638,788	39,313
11	Kab. Majalengka	92,031	642,722	39,796
12	Kab. Purwakarta	107,753	454,475	45,455
13	Kab. Subang	153,180	666,936	81,438
14	Kab. Sukabumi	73,593	855,802	105,026
15	Kab. Sumedang	55,856	629,007	40,770
16	Kab. Tasikmalaya	56,802	801,713	77,536
17	Kota Bandung	333,064	989,246	40,908
18	Kota Bekasi	238,682	630,404	15,065
19	Kota Bogor	95,730	439,254	21,019
20	Kota Cirebon	47,826	358,971	33,873
21	Kota Depok	141,338	456,937	19,293
22	Kota Sukabumi	29,526	287,531	40,088
23	Kota Tasikmalaya	46,889	418,874	40,445
24	Kota Cimahi	44,520	339,007	31,747
25	Kota Banjar	26,749	209,611	31,070
26	Kab. Bandung Barat	52,640	566,578	19,130

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun Anggaran 2006 - 2008 (diolah)

Tabel diatas menunjukkan porsi DAU pada pos dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah pada tahun 2009, masih tertinggi dibandingkan dana

perimbangan lainnya, yaitu dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak dan dana alokasi khusus. Dengan pertimbangan komposisi tersebut penulis mengambil DAU sebagai variabel yang akan diteliti beserta variabel lainnya, yakni PAD dan Belanja Modal.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan oleh Bernanda Gatot Tri Bawono (2008) dengan judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jabar dan Banten)”. Penelitian ini membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi jumlah dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel dependent-nya yaitu Belanja Modal, dan periode yang digunakan adalah tahun 2007-2009 pada daerah Jawa Barat, Sehingga skripsi ini berjudul :

“ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat) “

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Belanja Modal pada kabupaten /kota di Jawa Barat?
- 2) Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan terhadap Belanja Modal pada kabupaten /kota di Jawa Barat?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum serta belanja modal pemerintah daerah.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui;

- 1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Jawa Barat.
- 2) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan terhadap Belanja Modal pada kabupaten/kota di Jawa Barat.

1.4. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian sudah selayaknya memiliki kegunaan baik untuk penulis maupun pihak lain yang memerlukan. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi serta masukan atau pertimbangan untuk mengembangkan keilmuan akuntansi, khususnya mengenai mata kuliah akuntansi sektor publik terutama dalam bahasan tentang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum serta Belanja Modal pemerintah daerah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi Pemda dalam melakukan belanja modal dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.